

**SISTEM OPERASIONAL KLIRING PADA PT BANK MUAMALAT
CABANG PEKANBARU DAN SOLUSINYA MENURUT PERSPEKTIF**

EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy)*



Oleh:

ANDRI SATRIA
10825003282

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
RIAU
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **“Sistem Operasional Kliring yang Dilakukan pada PT Bank Muamalat Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

Kliring adalah perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat disuatu tempat dengan saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan, berguna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dalam suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Bank syari'ah juga mengambil sistem dan prosedur perbankan konvensional yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Untuk itu dibentuklah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berfungsi memberikan advis (masukan) kepada perbankan Islam guna memastikan Bank Islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui dalam Islam.

Kliring merupakan salah satu dari jasa perbankan yang diambil dari bank konvensional, sistem ini sebenarnya pernah dilakukan pada masa Rasulullah, dimana seorang sahabat yakni Ibnu Abbas pernah melakukan pengiriman uang ke Kuffah untuk keluarganya. Sistem yang digunakan pada masa Rasulullah itu menyerupai kliring ataupun jasa transfer lainnya,.Transfer ini merupakan salah satu bentuk dari wakalah.Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

. Sistem kliring yang digunakan sekarang tidak lagi sesederhana sistem pada zaman Rasulullah, sistem ini terus berubah sesuai dengan perkembangan

teknologi yang ada. Sistem kliring yang digunakan pada Bank Muamalat Pekanbaru adalah SKNBI.

Namun dalam proses kliring ini ada beberapa hal yang menghambat kelancaran prosesnya, diantaranya penolakan warkat. Warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat kliring, disebabkan karena kurangnya persyaratan warkat kliring diantaranya tanda tangan tidak lengkap, tanggal cek atau bilyet giro yang belum jatuh tempo dan lain-lainnya.

Seperti yang penulis amati pada Bank Muamalat Pekanbaru, Pelaksanaan kliring pada Bank Muamalat Pekanbaru diawali dengan petugas kliring menerima warkat dari nasabah, lalu petugas kliring menstempel warkat kliring dengan stempel kliring kemudian mencatat warkat kliring kedalam daftar kliring, neraca kliring disesuaikan dengan nota-nota kredit yang diberikan Bank Muamalat Pekanbaru sesuai dengan bank yang mengeluarkan warkat itu sendiri.

Di dalam mengatasi cek kosong, Bank Muamalat Pekanbaru melaksanakan *overdraft* berupa denda.

Di lapangan, penulis melihat dalam pelaksanaan kliring pada Bank Muamalat Pekanbaru dalam hal operasional kliring ada beberapa kekurangan diantaranya, pihak manajemen yang mengelola kliring ini tidak terfokus pada persoalan kliring saja, akan tetapi juga terfokus pada persoalan operasional lainnya, diantaranya pembuatan prosedur pendanaan maupun pembiayaan. Sehingga pelaksanaan warkat terlambat. Dan di dalam mengatasi cek kosong, Bank Muamalat Pekanbaru melakukan penerapan denda. Denda itu disebut dengan

Overdraft. Sementara Islam melarang mengambil keuntungan dalam penyelesaian hutang piutang. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan batasan masalah bagaimana sistem operasional kliring yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Islam, dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan kliring yang dilakukan pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru? Dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kliring pada bank Muamalat Cabang Pekanbaru ?

Penelitian ini bersifat lapangan yaitu di Pekanbaru pada PT BANK MUAMALAT CABANG PEKANBARU yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, Observasi, dan studi pustaka. Sedangkan metode analisa data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara melakukan pengamatan pada objek penelitian dan membandingkan hasil pengamatan dengan teori-teori yang berhubungan dengan itu serta mengambil kesimpulan bagaimana sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Islam karena pihak bank menganut prinsip tolong menolong dan prinsip kehati-hatian serta melakukan efek jera bagi yang melakukan bentuk penipuan ini. Namun disisi lain, berhubungan dengan denda yang dilakukan oleh Bank Muamalat Pekanbaru dapat digolongkan ke dalam riba *nasiah*.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	11
A. Sejarah	11
B. Sejarah berdirinya Bank muamalat Pekanbaru.....	16
C. Visi dan misi Bank Muamalat Pekanbaru	18
D. Struktur organisasi	18
E. Aktivitas Bank Muamalat Pekanbaru	19
BAB III TEORI KLIRING DAN PELAKSANAANNYA.....	23
A. Kliring.....	23
1. Pengertian Kliring.....	23
2. Peserta Kliring	26
3. Jenis Kliring.....	26
B. Jenis Warkat	27
C. Pihak yang Terkait dalam Transaksi Kliring	30
D. Tujuan Kliring	36
E. Pelaksanaan Kliring	36
1. Kliring Penyerahan	37
2. Kliring Retur.....	39
F. Kliring dalam konsep islam	42

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	46
A. Sistem Operasional kliring pada Bank Muamalat Pekanbaru	46
B. Tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan kliring pada Bank Muamalat Pekanbaru.....	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	
BIOGRAFIS PENULIS	

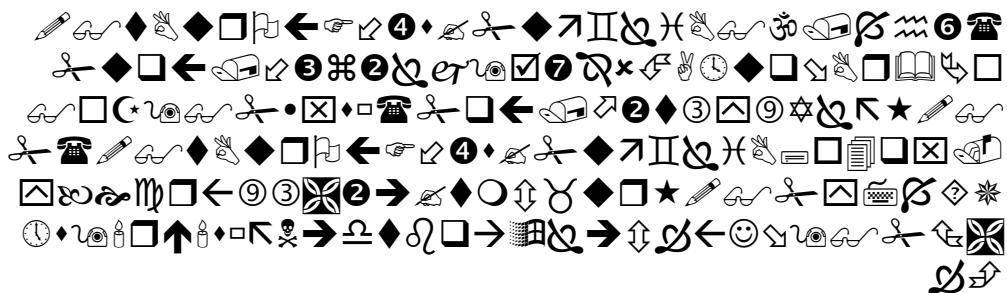
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan yang mendasar antara perbankan syari'ah dan perbankan konvensional yaitu terdapatnya sistem bunga pada bank konvensional. Di mana bank yang menggunakan sistem bunga (*interest*) sangat jelas bertentangan dengan syari'at Islam (*riba*). Untuk itu dibuatlah alternatif pengganti bunga dengan dikembangkan sistem bagi hasil yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perbankan di Indonesia.

Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 39:



Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. 30: 39)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa dari sistem bunga tidaklah menambah pahala disisi Allah SWT. melainkan akan mengurangi nilai dan rizki yang diperoleh.

Bank syari'ah juga mengambil sistem dan prosedur perbankan konvensional yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Untuk itu dibentuklah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berfungsi memberikan advis (masukan) kepada perbankan Islam guna memastikan Bank Islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui dalam Islam.

Adapun yang menjadi tugas bank mengumpulkan dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito. Di segi lain yaitu dalam bidang pengeluaran dapat berupa pemberian pinjaman atau kredit, ikut serta dalam permodalan perusahaan dan sebagainya. Selain dari itu, tugas bank bukan terbatas pada apa yang kita maksud di atas saja, namun termasuk juga kegiatan dalam bidang jasa-jasa perbankan lainnya seperti kliring.¹

Kliring merupakan salah satu dari jasa perbankan yang diambil dari bank konvensional, sistem ini sebenarnya pernah dilakukan pada masa Rasulullah, dimana seorang sahabat yakni Ibnu Abbas pernah melakukan pengiriman uang ke Kuffah untuk keluarganya.² Berdasarkan pandangan penulis, sistem yang digunakan pada masa Rasulullah itu menyerupai kliring ataupun jasa transfer lainnya. Transfer ini merupakan salah satu bentuk dari wakalah. Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.³

Menurut Bank Indonesia, *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas

¹Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1999), h. 124

²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 19

³Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema insane, 2001), h. 120

nama pemberi kuasa.⁴Sistem yang digunakan pada masa itu adalah secara manual dan sederhana. Sedangkan menurut Idrus Ahmad al-wakalah ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusan kepada orang lain yang dibolehkan oleh syra' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus mewakilkan masih hidup.⁵Jika dibandingkan dengan sistem kliring pada saat ini lebih efektif dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem kliring yang digunakan sekarang tidak lagi sesederhana sistem pada zaman Rasulullah, sistem ini terus berubah sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.

Dalam kamus perbankan Indonesia, kliring adalah perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat disuatu tempat dengan saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.⁶

Menurut Sunarto Zulkifli,kliring adalah sarana perhitungan hutang piutang antar bank peserta kliring guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dalam suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh bank Indonesia.⁷

Sedangkan menurut”*The New Grolier Webster International Dictionari Of English Language*”,kliring adalah *the act exchaging draft on*

⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. Ketiga, h. 33

⁵Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008),h.231

⁶Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 123

⁷Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2003), Cet. 1

each other and settling the differences (kliring adalah kegiatan tukar menukar warkat dari bank satu dengan bank lainnya dan menetapkan perbedaannya.)⁸

Semakin banyaknya transaksi dagang yang melibatkan pembayaran menggunakan jasa bank mengakibatkan semakin banyaknya transaksi giral antar bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

Lembaga kliring dibentuk oleh Bank Indonesia yang berkedudukandi Jakarta dan kota-kota lain yang telah memungkinkan adanya suatu perhitungan kliring antara bank-bank setempat.⁹ Lembaga kliring ini menjadi tempat berkumpulnya semua anggota yang diberikan otoritas untuk menyerahkan dan menerima warkat-warkat kliring serta berhak menandatangani neraca kliring.

Waktu dan pelaksanaan kliring ini ditentukan oleh Bank Pelaksana, pelaksanaannya dua kali dalam setiap hari kerja. Pertemuan pertama dan kedua masing-masing karyawan yang bertugas dari bank peserta kliring saling menukarkan warkat-warkat yang ada dan melihat apakah warkat yang diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pusat dan sesuai dengan aturan yang ada.¹⁰

Namun dalam proses kliring ini ada beberapa hal yang menghambat kelancaran prosesnya, diantaranya penolakan warkat. Warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring

89 ⁸Malayu, HS, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Cet. 4, h.

⁹Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 120

¹⁰Anwari Achmad, *Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan*, (Jakarta: Balai Aksara, 1985), h.

terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat kliring, disebabkan karena kurangnya persyaratan warkat kliring diantaranya tanda tangan tidak lengkap, tanggal cek atau bilyet giro yang belum jatuh tempo dan lain-lainnya.¹¹

Seperti yang penulis amati pada Bank Muamalat Pekanbaru, Pelaksanaan kliring pada Bank Muamalat Pekanbaru diawali dengan petugas kliring menerima warkat dari nasabah, lalu petugas kliring menstempel warkat kliring dengan stempel kliring kemudian mencatat warkat kliring kedalam daftar kliring, neraca kliring disesuaikan dengan nota-nota kredit yang diberikan Bank Muamalat Pekanbaru sesuai dengan bank yang mengeluarkan warkat itu sendiri.

Pada Bank Muamalat Pekanbaru, pelaksanaan kliring pertama dilakukan oleh petugas berwenang menyerahkan warkat pada bagian koordinator kliring untuk dicatat kedalam neraca kliring. Setelah kliring pertama dilanjutkan dengan kliring kedua apa ada kekurangan prosedur yang mengakibatkan penolakan warkat. Pada kegiatan kliring kedua ini lebih dikenal dengan kliring retur.

Di lapangan, penulis melihat dalam pelaksanaan kliring pada Bank Muamalat Pekanbaru dalam hal operasional kliring ada beberapa kekurangan diantaranya, pihak manajemen yang mengelola kliring ini tidak terfokus pada persoalan kliring saja, akan tetapi juga terfokus pada persoalan operasional

¹¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.

lainnya, diantaranya pembuatan prosedur pendanaan maupun pembiayaan. Sehingga pelaksanaan warkat terlambat.

Dengan masalah diatas, untuk lebih memperjelas pelaksanaan kliring yang dilakukan Bank Muamalat Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir ini dengan judul: **“SISTEM OPERASIONAL KLIRING PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PEKANBARU DAN SOLUSINYA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis menentukan identifikasi masalah, maka penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan pada bagaimana sistem operasional kliring pada PT. Bank Muamalat Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Islam

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kliring yang dilakukan pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kliring pada bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kliring yang dilakukan oleh Bank Muamalat Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kliring pada bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis terutama tentang sistem operasional kliring yang dilakukan pada bank syari'ah.
- b. Kiranya pembahasan ini dapat bermanfaat bagi setiap mahasiswa secara khusus dalam materi perkuliahan yang berkaitan dengan kliring.
- c. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi Bank Muamalat Pekanbaru.
- d. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena Bank pertama syariah di pekanbaru dan mudah dijangkau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

Objek dalam penelitian ini adalah konsep sistem operasional kliring pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru Bagian Kliring yang berjumlah 3 orang. Berhubung populasi sedikit, maka penulis sekaligus menjadikannya sebagai sampel dengan teknis total sampling.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada karyawan yang terkait pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan nasabah serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan mengamati langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang sistem operasional kliring yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.
- b. Wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada karyawan bagian kredit / utang piutang pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

- c. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹²

6. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif,¹³ yaitu menjabarkan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan, kemudian dengan berpedoman pada sumber tertulis sebagai langkah konfirmasi mengenai data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ilmiah ini, yaitu menggunakan metode-metode yang

- a. Deduktif yaitu menggunakan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggunakan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Diskriptif yaitu mengemukakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami hasil penelitiannya, maka penulis memaparkan sistematika penulisan ke lima bab tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹² Soehadi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*, (Yogyakarta : Lukman offset, 1999), hal.59

¹³ Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi penelitian Sosial-Agama*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 136-137.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab dua ini berisi gambaran umum Bank Muamalat Pekanbaru yang terdiri dari, sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, sejarah berdirinya Bank muamalat Pekanbaru, visi dan misi Bank Muamalat Pekanbaru, struktur organisasi, dan aktivitas Bank Muamalat Pekanbaru.

BAB III: TEORI KLIRING DAN PELAKSANAANNYA

Pada bab tiga ini akan dikemukakan tentang landasan teori masalah yang dibahas yaitu: pengertian kliring, jenis warkat, ketentuan kliring, pihak yang terkait dalam transaksi kliring, tujuan kliring, dan pelaksanaan kliring dan kliring dalam konsep Islam .

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Dalam Bab ini, penulis akan merupakan hasil dari pembahasan dan penelitian yang berisikan Sistem Operasional kliring pada Bank Muamalat Pekanbaru dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kliring pada Bank Muamalat Pekanbaru.

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini, terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan dan deregulasi di sektor perbankan, sejak 1 Juni 1983 membebaskan bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya. Hal ini memberikan peluang bagi umat Islam untuk mengoprasionalkan bank tanpa bunga (0%) dengan sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian murni.¹

Ide konkrit di dalam pencirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari sebuah acara lokakarya “*Banda Bank dan Perbankan*” yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Lokakarya tersebut tidak memberikan suatu keputusan yang akhir tentang, status hukum bunga bank tersebut.² Namun, ketika K.H. Hasan Basri (ketika ia menjabat sebagai ketua MUI) mengusulkan pendirian bank berdasarkan syariah Islam, semua peserta lokakarya berhasil mencapai kata sepakat untuk mendirikan bank tersebut.

Lokakarya tersebut merekomendasikan kepada MUI untuk mengambil prakarsa penyempurnaan. Penyempurnaan yang dimaksud itu adalah konsep perbankan bebas bunga dari segi ideal konsepsional, teknis, administratif, manajemen, dan hukum sesuai dengan syariah.

¹*Republika*, 27 April 1993, h. 6 kolom 3

²Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal. 57-58

Ide ini kemudian di pertegas dalam Munas IV di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. setelah Munas IV, MUI membentuk kelompok keda (Pokja), yang diketuai oleh Prodjo Kusumo, Sekretaris Jendral MUI. Untuk kelancaran pelaksanaan tersebut, Pokja membuat tim kecil “Penyiapan Buku Panduan Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh Dr. Amin Azis, dengan Anggota M. Syahrul Ralis Siregar, A. Malik dan Zainal Bahar Noor, SE. tim kecil ini selanjutnya diperkuat oleh : In Abdul Azis Kunjoaddji, Drs. Fuadi Mourad, Chalid Hsb, BA, Jimly Assiddiclie, NLA, dan Abdul Manan, MBA.³

Tugas penting yang dilakukan oleh tim perbankan MUI di samping pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan pihak terkait, adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui “Management Development Program” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), sekarang Institute Banking Indonesia di Jakarta. Acara ini dibuka tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan , Drs. Nasruddin Sumintapura, MA.⁴

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) juga memiliki peran aktif dalam pembentukan Bank Muamalat ini, dimana dari ICMI dibentuk beberapa tim yaitu : Tim Pendanaan diketuai oleh Dr. In M. Amin Azis, Tim Hukum diketuai oleh Drs. Nasrudin Sumintapura, Tim Anggaran dan Komposisi Manajemen diketuai oleh Drs. Rahmat Saleh.

Pada tanggal 27 Agustus 1991, tim perbankan MUI mengadakan

³Laporan Tahunan, *Bank Muamalat Indonesia*, 1993, hal. 5

⁴*ibid*

pertemuan dengan mantan Presiden RI ke-2 H.M. Soeharto, di Bina Graha. Dalam pertemuan tersebut Bapak H.M. Soeharto dan H. Sudharmono berkenan menjadi pemrakarsa dan merencanakan pertemuan dengan para pengusaha muslim pada tanggal 11 Oktober 1991 di Bogor. Pada pertemuan Bogor Juga disepakati bahwa Bank Islam yang akan dibentuk itu diberi nama Bank Muamalat Indonesia disingkat BMI.

Pada pertemuan Presiden dengan para pengusaha muslim di Bogor terkumpul dana 106 miliar. Diantara para pengusaha muslim yang turut dalam penggalangan dana tersebut adalah DR. Sukamdi Sahid Gitosarjono, Probosutejo, M. Hasan, Abdul Latif Agus dan banyak lagi pengusaha yang tercatat dalam 227 pemegang saham pendirian Bank Muamalat. Disamping itu terkumpul dana Rp 70 miliar pada pertemuan pengusaha dengan beberapa Menteri di Hotel Sahid Jakarta atas prakarsa Bapak Ginanjar Kartasasmita (ketika itu menjabat sebagai Menteri)

Berdasarkan laporan keuangan, tercatat komposisi kepemilikan saham PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

NO	Nama	Total Lembar Sahara	Presentase
1	Islamic Development Bank	229,746,116	28.01 %
2	Boudyan Bank Kuwait	174,550,281	21.28 %
3	Atwill Holdings limited	125,676,203	15.32 %
4	Abdul Rahim	55,000,000	6.71 %
5	Rizal Ismail	45,000,000	5.49 %
6	Drs. H. Abbas Adhar	26,627,296	3.25 %
7	IDF Foundation	24,437,039	2.98 %
8	BMF Holdings Limited	24,437,039	2.98 %
9	Badan Pengelola ONHI	19,990,000	2.44 %
10	Masyarakat	94,787,775	11.56%
	Jumlah	820,251,749	100.00 %

Sumber : BMI Cabang Pekanbaru

Setelah lebih kurang setahun tercetusnya ide pendirian bank tanpa bunga, pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel Sahid Jaya di hadapan notaris Yudoparipurno, SH. Dengan akte notaris No. 1 Tanggal 1 November 1991, dan izin Menteri kehakiman No. C2.2413.HT.01. tanggal 21 Maret 1992. Berita. Negara RI.

Tanggal 28 April 1992 No. 34 Surat Menteri Keuangan RI.No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan izin Usaha berdasarkan keputusan Menteri RI.No. 430/MK.013/1992 tanggal 24 April 1992. BMI mulai beroperasi dengan modal Rp 500 Miliar, dengan modal disetor sebesar Rp 106.126.382.000,000.⁵

Pada, hari Jum'at 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992, Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia dengan upacara, "*Soft Opening*" yang diadakan di kantornya di gedung Arthaloaka di Jalan Jenderal Sudirman No. 02 Jakarta.

Acara resmi "Grand Opening" diadakan dua minggu setelah itu, Jum'at 12 Dzulkodah 1412 H bertepatan dengan 15 Mei 1992 di Puri Agung HotelJaya.aya. Peresmian tersebut diawali dengan sambutan Sudharmono, SH(ketika menjabat sebagai Wakil Presiden) yang sekaligus menandatangani prasasti menandatangani berdirinya Bank pertama di Indonesia yang dioperasikan dengan konsep syari'ah.⁶

⁵.*Ibid*

⁶.*Ibid* Hal. 8

Adapun landasan hukum operasi Bank Syariah di Indonesia diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 sebagai revisi UU.No. 7 tahun 1992, yaitu pada pasal 1 angka 4, 12, 13, dan 23.pasal 6 huruf m, pasal 7 huruf c, pasal 8, pasal 11, pasal 13, dan pasal 29 angka 3. Dalam pasal 13 UU No. 10 tahun 1998 dikatakan :

*Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)*⁷

UU ini dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil, yang secara jelas memberi batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Lebih lanjut dalam penjelasan PP tersebut disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam pemerintah ini adalah prinsip muamalat dalam melakukan usaha bank”.⁸

⁷Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998, *Tentang Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika 1999), hal. 10

⁸*Dokumentasi Bank Muamalat*, tahun 1994, hal. 1

B. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat cabang Pekanbaru

Sampai tahun 2005 Bank Muamalat telah memiliki 47 kantor cabang, 12 kantor cabang pembantu dan 92 kantor kas, 50 kantor pos dan 2 Unit Pelayanan syariah (UPS). Salah satu kantor cabang Bank Muamalat Indonesia adalah di Pekanbaru Riau, yang beralamat di jalan Sudirman No. 417-419 Pekanbaru.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabana Pekanbaru resmi dibuka pada tanggal 4 Mei 2000. Diresmikan oleh Gubernur Riau, H. Saleh Djasit, SH disaksikan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia, sejumlah tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan dan sebagian besar masyarakat Pekanbaru. Lebih kurang 7 bulan sebelum diresmikan, tepatnya semenjak Oktober 1999, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk telah ada di Pekanbaru, berkantor di Mutiara Merdeka Hotel. Namun belum beroperasi sebagaimana mestinya karena masih dalam tahap promosi dan informasi.⁹

Dengan dibukanya Bank Muamalat cabang Pekanbaru, masyarakat Riau umumnya, dan masyarakat Muslim Pekanbaru khususnya, dapat menjadikan Muamalat ini sebagai alternatif lain dalam melakukan hubungan perbankan selama ini hanya terfokus kepada bank Konvensional. Disamping, itu bank ini mengarahkan usahanya untuk membantu kalangan masyarakat ekonomi lemah. Bank Muamalat cabang Pekanbaru diresmikan setelah sebulan sebelumnya Bank ini dibuka lebih dahulu di Medan, Sumatra Utara yaitu pada tanggal 17 April 2000.

⁹. Suhendi, *Wawancara*, Account Manager Pada Bank Muamalat Cabana Pekanbaru.

Ada beberapa hal yang, memotivasi dibukanya Bank Muamalat di kota Pekanbaru bertuah ini yaitu:

1. Merupakan strategi bank untuk memperluas jaringannya, karena hal ini akan menambah erat hubungan antara bank dengan nasabahnya.
2. Riau merupakan *Muslim Area*
3. Permintaan dari masyarakat Riau sendiri.
4. Melihat perkembangan Riau yang semakin produktif.

Tujuan dari pendirian Bank Muamalat cabang pekanbaru ini bukan hanya sekedar mengejar laba, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan ekonomi umat berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Strategi yang digunakan oleh pihak bank untuk mengembangkan sistem syari'ah di Pekanbaru adalah strategi "jemput bola" pelayanan produktif. Dari segmen penghimpunan dana diarahkan pada sektor pendidikan, seperti kesekolah-sekolah dan perguruan tinggi agar orang yang ada di dalamnya gemar menabung.

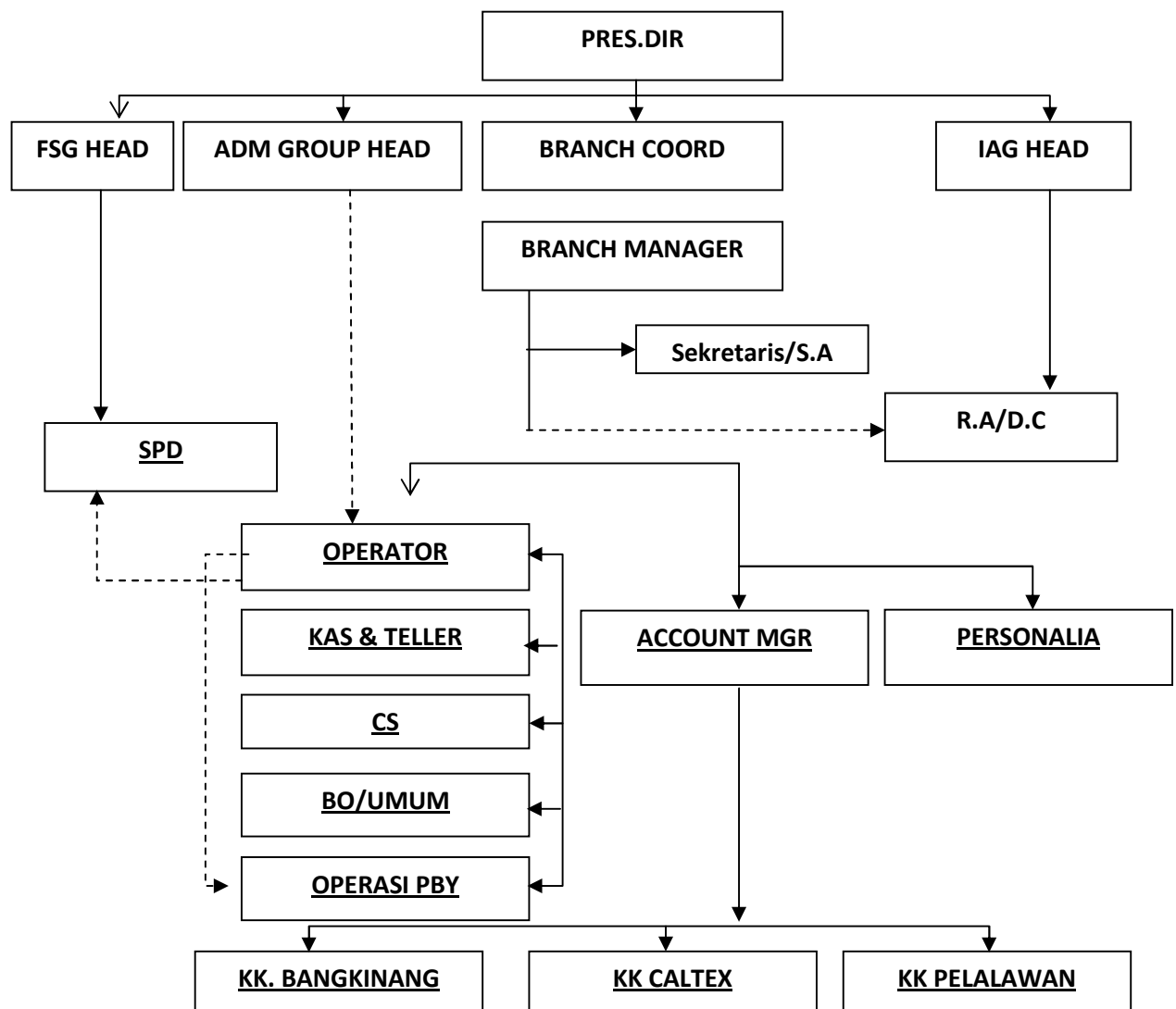
Data aktifitasnya sehari-hari Bank Muamalat Cabang Pekanbaru menggunakan jaringan *Computerize On Line* yang dinamakan KIBLAT (Kumpulan Informasi Bank Layanan Aplikasi Terpadu), berkoneksi dengan bank Muamalat Pusat, Bank Indonesia, dan Bank lainnya yang ada di Riau. Disamping itu juga terdapat ruang khazanah utama tempat penyimpanan kas dan Surat berharga yang dilengkapi dengan sistem pengaman, dan dilengkapi dengan satu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).¹⁰

¹⁰*Ibid*

C. Visi dan Misi Bank Muamalat Pekanbaru

Visi BMI adalah menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, yang dominan dipasar dan dikagumi dipasar nasional. Sedangkan Misi BMI adalah menjadi role model lembaga keuangan di Dunia, dengan penekanan pada semangat kewirausahaan manajemen yang unggul, orentasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada stake holder.¹¹

D.Struktur Organisasi



¹¹ Dokumentasi Bank Muamala, 2005

E. Aktivitas Bank Muamalat Cabang Pekanbaru

Keberadaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat khususnya umat muslim dengan meningkatkan taraf kehidupan melalui produk-produk yang disediakan, baik hubungannya dengan menabung atau meminjam. PT. Bank Muamalat yang ada di Pekanbaru membuka beberapa fasilitas untuk para penabung dan penitip, seperti Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Shar-E, Tabungan Ummat Junior, Tabungan Haji Arafah, dan sebagainya.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru yang bergerak di bidang penghimpunan dana lebih mengutamakan membantu masyarakat muslim untuk mengembangkan usahanya. Orang yang menabung, di Bank Muamalat secara otomatis ikut membantu saudaranya sesama muslim. Ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk menabung, menitip dan jasa lainnya, antara lain:

1. Giro Wadi'ah

Yaitu tabungan yang menerapkan akad wadi'ah yang mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad al-amanah*, yaitu suatu akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan, sedangkan bank bertanggungjawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan. Dalam hal ini dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia seperti fasilitas ATM.

Adapun keuntungan dan tabungan ini adalah:

- a. Merasa aman dan tentram
- b. Terhindar dari penyusutan
- c. Mendapatkan jasa tabungan
- d. Memanfaatkan waktu dan kesempatan

2. Tabungan Mudharabah

Yaitu tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* dengan mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Adapun keuntungan dari tabungan ini adalah

- a. Mempersiapkan untuk hari esok yang lebih baik
- b. Mudah dalam perencanaan
- c. Mendapatkan hasil yang halal
- d. Keamanan dana
- e. Turut membantu lembaga keuangan berdasarkan syari'ah Islam

3. Deposito Mudharabah

Yaitu nasabah sebagai deposan bertindak sebagai *shohibul maal* dan Bank Muamalat selaku *Mudharib*. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya.

Adapun keuntungan dari produk ini adalah:

- a. Deposito bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank sebagai pengelola. Prinsip yang digunakan adalah sistem bagi hasil (*mudharabah*) antara pemilik modal dengan pengelola yang besarnya misal 70 : 30, yaitu 70 % untuk pemilik modal, dan 30 % untuk bank.

- b. Depositor tidak terlibat dalam manajemen bank
- c. Depositor dapat memilih jangka waktu penyimpanan

Disamping dari keuntungan tentang keamanan, penyusutan dan pemanfaatan uang juga dengan mendepositokan bank di bank-bank Islam secara otomatis kita turut membantu orang lain sekaligus telah mengeluarkan zakat dan membagikannya kepada orang yang berhak mendapatkannya melalui perantara bank.

4. Shar-E

Yaitu suatu investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp 125.000, dan dapat diperoleh di kantor-kantor pos Online diseluruh Indonesia. Adapun keuntungan dari produk ini adalah :

- a. Easy, yaitu mudah memilikinya dan mudah menyetor dan pengelolaan dananya. Dengan membeli paket perdana. Shar-E anda langsung menjadi Nasabah Bank Muamalat.
- b. Everywhere, yaitu cukup, membeli paket Shar-E di kantor pos terdekat diseluruh Indonesia. Dan dapat melakukan penyetoran tabungan investasi melalui selLirLih kantor pos online.
- c. Extraordinary, yaitu setiap bulan memperoleh bagi hasil murni syariah yang akan ditambahkan langsung ke rekening setiap bulannya.
- d. Fasilitas Phone banking 24 jam, yaitu informasi saldo, histori transaksi, rubah PIN, pembayaran ZIS, dan lainnya.
- e. Kartu ATM dengan penarikan tunai dari 8.800 jaxingan. ATM.

5. Tabungan Ummat Junior

Yaitu tabungan untuk pelajar yang berprestasi yang akan diundi dan diberikan reward. Adapun keuntungan dari produk ini adalah:

- a. Mendapat Reward
- b. Kartu ATM akses lebih dari 8.000 jaringan ATM BCA dan ATM bersama diseluruh Indonesia.
- c. Bagi hasil yang menarik, otomatis ditambah ke rekening tabungan setiap bulan
- d. Fasilitas Phone banking 24 jam

6. Tabungan Haji Arafalt

Yaitu tabungan haji untuk mempersiapkan rencana ke Baitullah secara terencana. Adapun keistimewaan dari tabungan ini adalah:

- a. Memperoleh bagi hasil yang menarik yang secara otomatis akan ditambah ke dalam saldo tabungan Arafah setiap bulan sehingga tabungan senantiasa berkembang.
- b. Tahun keberangkatan dan besarnya setoran tabungan dapat direncanakan sesuai kemampuan, semakin matang persiapan anda karena direncanakan jauh sebelumnya, dan semakin ringan biaya perjalanan haji yang akan dibayarkan.
- c. Adanya jaminan dari Bank Muamalat dengan Siskohot Depertemen Agama, sehingga memberikan kepastian untuk memperoleh porsi keberangkatan haji.
- d. Adanya perlindungan Asuransi Syariah yang memberikan jaminan terpenuhnya BPIH kepada ahli waris.

BAB III

TEORI KLIRING DAN PELAKSANAANNYA

A. Kliring

1. Pengertian Kliring

Semakin banyaknya transaksi dagang yang melibatkan pembayaran dengan bank, mengakibatkan semakin banyaknya transaksi giral antar bank. Maksud dari giral ini adalah uang tunai yang dititipkan pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat baik dengan menggunakan cek maupun bilyet giro. Dengan kata lain uang giral adalah saldo rekening koran nasabah di bank.¹

Kelancaran transaksi yang timbul dari pembayaran menuntut semakin mudah dan rapi transaksi penyelesaian transaksi giral. Oleh sebab itu, bank selaku lembaga keuangan penyelenggaraan transaksi giral harus menyediakan kemudahan mekanisme transaksi giral ini, salah satunya dengan jasa kliring.

Kliring merupakan sarana untuk menyelesaikan transaksi giral, kegiatan ini merupakan kegiatan yang lazim ditemukan dalam setiap bank, karena kegiatan ini akan menyelesaikan hutang dan piutang antar bank yang berasal dari transaksi giral para nasabah.

Kata kliring berasal dari *clear* (bahasa Inggris, *clear* sebagai kata sifat berarti jelas, terang; sedangkan *to clear* sebagai kata kerja yang

¹[Staffsite.Gunadarma.ac.id/Mudasah/index.php?stateid=download&id=6400&part=files:Akuntansi Kliring](http://Staffsite.Gunadarma.ac.id/Mudasah/index.php?stateid=download&id=6400&part=files:Akuntansi%20Kliring), 12.03pm, 06 Agustus 2008

berarti membersihkan, menyelesaikan). Penggunaan kata *clear* menjadi *clearing* berasal dari kata kerja *to clear*. Dari kamus *The New Glorier Webster International Dictionary of English Language*, volume I yang penulis kutip dari buku *Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan* karangan Achmad Anwari yaitu: “*The act of exchanging drafts on each other and setting the differences*”, (kliring adalah kegiatan tukar menukar warkat dari bank satu dengan bank lainnya dan menetapkan perbedaan-perbedaannya).² Istilah *clearing* (bahasa Inggris) di bahasa Indonesia menjadi kliring. Untuk itu selanjutnya dalam buku ini menggunakan ejaan kliring.

Dalam kamus perbankan yang disusun oleh tim penyusun Kamus Perbankan Indonesia yang penulis kutip dalam buku *Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan*, yaitu: “perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat dagang, yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan”.³

Sebenarnya banyak pemerhati perbankan dalam menetapkan definisi kliring, N. Lapoliwa dan Daniel S. Koeswandi misalnya dalam buku *Akuntansi Perbankan* menjelaskan bahwa kliring adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari satu bank terhadap bank lainnya dengan maksud

²Achmad Anwari, *Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan*, (Jakarta: Balai Aksara, 1985), h. 13

³*Ibid.*,

agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.⁴

Lalu lintas pembayaran giral ini adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat bank yang diperhitungkan atas beban dan untuk keuntungan rekening nasabah bank yang bersangkutan.⁵ Akibatnya setiap bank diwajibkan melihat jumlah saldo alat likuid dalam bentuk rekening giro pada Bank Indonesia untuk menampung semua penarikan dan penyetoran nasabah masing-masing yang akan mengakibatkan bertambah atau berkurangnya saldo giro tersebut, alat likuid ini harus dipelihara oleh suatu bank pada rekening giro di Bank Indonesia untuk memenuhi syarat tersebut.⁶ Rekening giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penata usaha transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (Pasal 1 angka 7 PBI 6 / 21 / PBI / 2004).⁷

Kliring dilakukan oleh suatu lembaga kliring yang dikoordinasi oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Lembaga kliring ini menjadi tempat berkumpulnya semua anggota *clearingman/clearinggirl* dari bank anggotanya untuk perhitungan, pelunasan dan pertukaran warkat-warkat kliring. Karyawan dan karyawan suatu bank yang diberikan otoritas untuk armenandatangani neraca kliring. Karyawan dan karyawan harus

⁴N. Lapoliwa dan Danil S. Koeswandi, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1988), h. 43

⁵WWW.Google.com

⁶N. Lapoliwa dan Danil S. Koeswandi, *Loc. Cit.*,

⁷Zubairi Hasan, *Undang- Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta, : Rajawali Pers.,2011),h. 125

diberitahukan secara formal dan kartu *speciment* yang diberikan oleh Bank Indonesia.⁸

2. Peserta Kliring

Peserta kliring dapat dibedakan menjadi dua macam:

- a. Peserta Langsung, yaitu: bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkat dan notanya secara langsung oleh BI atau melalui PT. Trans Warkat sebagai perantara dengan BI.

Contoh: Bank Rakyat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri.

- b. Peserta tidak langsung, yaitu: bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta kliring akan tetapi mengikuti kegiatan kliring melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta kliring.

Contoh: BPR.

3. Jenis-Jenis Kliring

Kliring terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- a. Kliring umum, adalah: sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh BI.
- b. Kliring lokal, adalah: sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring (wilayah yang ditentukan).
- c. Kliring antar cabang, adalah: sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam suatu wilayah

⁸Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 120

kota. Kliring ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor-kantor cabang lainnya yang bersangkutan dengan kantor induk yang bersangkutan.⁹

B. Jenis Warkat

Warkat adalah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring.¹⁰ Warkat kliring yang dapat dikliringkan adalah harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh serta telah jatuh tempo pada saat dikliringkan. Nota atau warkat yang dapat dikliringkan dapat dikelompokkan kedalam 4 macam warkat kliring:

1. Nota debit keluar, merupakan warkat yang disetorkan oleh nasabah bank untuk keuntungan rekeningnya. Bank penarik akan mendebet rekening giro pada Bank Indonesia. Dengan kata lain penyerahan itu akan menambah jumlah dana bank yang menyerahkan warkat.
2. Nota debit masuk yang merupakan warkat kliring yang diserahkan kepada bank lain, dimana dengan penyerahan itu akan mengurangi jumlah dana bank yang menerima warkat.
3. Nota kredit masuk yang merupakan warkat kliring yang diserahkan kepada bank lain, dimana dengan penyerahan itu akan menambah dana bank yang menerima warkat kliring.

⁹Guna Darma, *Loc. Cit.*,

¹⁰Achmad Anwari, *Loc. Cit.*,

4. Nota kredit keluar yang merupakan warkat kliring yang diserahkan kepada bank lain dimana dengan penyerahan itu akan mengurangi jumlah dana bank yang menyerahkan warkat.¹¹

Sedangkan warkat yang dapat diperhitungkan adalah:

- a. Cek adalah suatu intruksi dari anda ke bank anda untuk mengirimkan uang dari rekening anda ke rekening orang lain ketika orang tersebut menyetorkan cek yang diterimanya.¹²
- b. Bilyet giro termasuk bilyet giro Bank Indonesia
- c. Nota debet
- d. Nota kredit
- e. Wesel bank untuk transfer yaitu wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer
- f. Surat bukti penerimaan transfer

Dalam ketentuan kliring tidak semua warkat yang bisa dikliringkan, tetapi warkat tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI yang berperan sebagai penyelenggara kliring, ketentuan tersebut adalah

- a. Warkat kliring yang dapat diperhitungkan dalam kegiatan kliring terbatas hanya pada warkat yang dinyatakan dalam rupiah dan nominal penuh serta telah jatuh tempo pada saat kliring.
- b. Cek, bilyet giro, wesel bank untuk transfer, serta bukti-bukti penerimaan uang dan nota kredit yang tidak dibatasi nilai nominalnya. Prinsip giro

¹¹Www.Google.com *Loc. Cit.*,

¹²Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat.2010

diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01 / DSN –MUI / IV / tentang giro.¹³

- c. Warkat nota debit dibatasi setinggi-tingginya bernilai nominal Rp. 10.000.000,- dan tidak dapat digunakan untuk transaksi.
- d. Cek, bilyet giro dan wesel yang dikliringkan dengan jumlah lebih besar dari Rp. 10.000.000,- harus di photo copy.
- e. Jika terjadi penilaian cek dan bilyet giro kosong, maka peserta kliring wajib menginformasikan data nasabahnya yang tergolong sebagai penarik cek dan bilyet giro kosong.
- f. Jenis penyelenggaraan kliring yang dapat dilaksanakan oleh pihak lain.
- g. Persyaratan dan bentuk hukum pihak lain yang dapat menyelenggarakan kliring.
- h. Tata cara pemberian persetujuan terhadap pihak lain yang akan menyelenggarakan kliring.¹⁴

Selain itu ada beberapa syarat dalam pelaksanaan kliring ini, yaitu:

- 1. Semua warkat kliring harus dibubuhi cap kliring yang memuat sebutan kliring, nama bank, nomor sandi, dan tanggal penyerahan. Ukuran dan bentuk cap kliring ini ditetapkan oleh Bank Indonesia. Cap kliring yang dimaksud diumumkan pada bank lain peserta kliring, demikian juga dengan terjadinya perubahan cap kliring.

¹³ Andri soemitra, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group

¹⁴ Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 1990), h. 96

2. Dalam hal pada suatu warkat terdapat lebih dari satu cap kliring, maka cap kliring yang terdahulu harus dibatalkan dengan cap pembatalan yang ditandatangani oleh pejabat uang berwenang.
3. Penunjukan atas petugas kliring yang berhak atas penunjukan BI dalam pelaksanaan kliring, dilakukan oleh pemimpin cabang di rekening BI. Dalam hal ini dilakukan dengan pengajuan surat resmi kepada BI.
4. Penunjukan pejabat yang berwenang untuk menandatangani warkat yang dikeluarkan oleh bank, dan penentuan besarnya batas wewenang oleh Direksi.
5. Setiap warkat yang dikeluarkan bank wajib ditandatangani oleh 2 orang pejabat bank yang berwenang.
6. Setiap warkat kliring yang diterima dari bank lain harus diperiksa keabsahan tanda tangannya.
7. Setiap penerimaan warkat kliring (nota kredit masuk) dari bank lain untuk kepentingan nasabah, maka atas penerimaan warkat kliring tersebut diberikan surat pemberitahuan.

C. Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi Kliring Dan Kewajibannya

Penyelenggaraan kliring langsung diselenggarakan oleh BI, segala kegiatan dalam penyelenggaraan kliring ditangani langsung oleh BI, segala rekapitulator, penghubung pelaksana penyusunan statistik ataupun laporan maupun sebagai koordinator.

Bila peserta kliring cukup banyak, maka pelaksanaan kliring dapat dibagi kedalam beberapa kelompok yang dikoordinasikan oleh pemimpin kelompok. Pimpinan kelompok ini bertugas untuk:

1. Menghubungkan angka-angka bank peserta kelompok.
2. Mengawasi dan menjaga ketertiban untuk kelancaran pelaksanaan perhitungan kliring dalam kelompok yang bersangkutan.¹⁵

Dalam hal ini segala kegiatan tentang kliring ditangani oleh bank operasional (kantor cabang) milik pemerintah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia selaku koordinator di satu daerah yang tidak ada atau belum ada kantor cabang Bank Indonesia.

Kemudian bank peserta kliring adalah bank-bank umum dan bank pembangunan yang berada didalam wilayah kliring tertentu dikoordinir Bank Indonesia/bank lain yang ditunjuk dalam wilayah itu.

Status peserta kliring lokal dapat dibedakan atas:

1. Penyertaan langsung, yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu ialah kantor Bank Indonesia, kantor pusat bank umum dengan bank pembangunan serta kantor cabang kedua bank itu.
2. Penyertaan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring. Yang ikut dalam penyertaan tidak langsung ini ialah kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Di samping itu,

¹⁵N. Lapoliwa dan Danil S. Koeswandi, *Op. Cit.*, h. 45

ditetapkan pula beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum atau kantor bank pembangunan, yaitu:

- a. Kantor bank yang bersangkutan harus mempunyai surat izin usaha dari Menteri Keuangan.
 - b. Keadaan administrasi dan keuangan bank tersebut memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring.
 - c. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank di wilayah yang bersangkutan.
 - d. Bank penyelenggara bank-bank peserta diwajibkan untuk menyetor jaminan kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit, kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi. Jaminan kliring ini berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.
 - e. Suatu kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
3. Bank menjadi peserta wajib mendapatkan sekurang-kurangnya satu kantor bank sebagai peserta langsung. Para peserta kliring harus memperhitungkan warkat-warkat tersebut kepada bank lainnya melalui kliring kecuali penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk keperluan

penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. Semua warkat kliring sebelum diajukan ke lembaga kliring harus terlebih dahulu dibubuhi cap kliring. Isi cap kliring memuat:

- a. Sebutan kliring
- b. Nama (singkatan bank peserta kliring yang menyerahkan warkat ke lembaga kliring).
- c. Tanggal penyerahan warkat ke lembaga kliring.
- d. Nomor kode kelompok (sandi bank peserta yang bersangkutan dalam lembaga kliring).

Maka dalam hal ini juga ada wakil peserta kliring. Setiap bank peserta, langsung menunjuk sekurang-kurangnya dua orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis pada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut. Wakil-wakil ini dibedakan atas dua golongan. Pertama, golongan A merupakan yang mempunyai wewenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca dan bilyet saldo kliring. Kedua, golongan B melaksanakan apa yang dilakukan golongan A. Golongan ini juga berwenang untuk mengubah, menambah dan menandatangani surat penolakan tersebut.¹⁶

Adapun yang menjadi kewajiban dari penyelenggara kliring ini adalah:

¹⁶Sri Susilo, dkk, *Op. Cit.*, h. 74

1. Melaksanakan kegiatan kliring lokal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kliring lokal yang ditetapkan oleh BI.
2. Menyampaikan laporan mingguan data kliring dan laporan likuiditas BI.
3. Menghitungkan bagi hasil hari itu kedalam rekening peserta, agar tidak memberatkan penyelenggara dalam menyediakan uang kartal. Dapat dijanjikan bahwa hasil kliring para peserta pada hari yang bersangkutan diperhitungkan pada kantor BI yang ditunjuk atau ditentukan (melalui cabang penampung) untuk menyampaikan debet nota-nota hasil kliring itu kepada peserta kliring.
4. Cabang tersebut harus mempunyai kreatifitas agar dapat menunjang kegiatan terutama penyediaan dana.
5. Cabang harus mampu mengatur kegiatan tata usaha dan non tata usaha kantor dengan baik.
6. Cabang harus mempunyai pemimpin yang cakap yang menunjuk beberapa orang sebagai pembantu ketua penyelenggara.
7. Wajib menyelenggarakan fasilitas penyelenggara dan informasi hasil penyelenggara kliring lokal.
8. Cabang telah dilengkapi sarana komunikasi yang memadai.
9. Penyelenggara wajib memiliki rencana penanggulangan kliring lokal jika dalam darurat.

10. Rencana penanggulangan segera diatasi penyelenggara kliring lokal dalam keadaan darurat. Antara lain perubahan jadwal kliring lokal dan pemindahan penyelenggaraan kliring lokal ke lokasi lain.
11. Jika secara penanggulangan segera tidak dapat dilaksanakan, penyelenggara dapat menghentikan untuk sementara kegiatan kliring lokal.
12. Wajib melaporkan secara tertulis jika terjadi keadaan darurat.

Lain halnya dengan kewajiban penyelenggara kliring, peserta kliring mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengikuti penyelenggaraan kliring lokal pada setiap hari kerja sesuai dengan jadwal kliring lokal yang ditetapkan penyelenggara.
- b. Menyediakan dana yang cukup pada rekening giro bank di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam kliring lokal.
- c. Menyediakan sarana kliring lokal dengan jenis dan spesifikasi yang disetujui oleh penyelenggara.
- d. Menentukan petugas kliring untuk mewakili peserta. Petugas kliring dapat merupakan petugas internal bank atau petugas jasa kurier yang diberi kuasa atau wewenang tertentu untuk mewakili peserta dalam kliring lokal.
- e. Melakukan pengamatan untuk mencegah terjadinya manipulasi kliring melalui kliring lokal.
- f. Segera melaporkan perubahan nama, status atau hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional kliring lokal secara tertulis kepada penyelenggara dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang dimaksud, pindah alamat suatu wilayah kliring.

- g. Mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggara kliring lokal.

D. Tujuan Kliring

Berdasarkan buku yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan yang ditulis oleh Malayu Hasibuan S.P menjelaskan tujuan-tujuan kliring diantaranya adalah:

1. Kliring dapat mempermudah dan mempercepat realistik dan aman bagi penyelesaian penagihan atau pembayaran nasabah bank.
2. Bank peserta kliring akan mempermudah penarikan nasabah.
3. Kliring akan mempermudah penyelesaian inkaso dan transfer.
4. Kliring akan mempermudah perhitungan pertukaran warkat dan pelunasan hutang-piutang antar bank peserta kliring.
5. Pengawasan kecukupan likuiditas bank peserta oleh BI.

E. Pelaksanaan Kliring

Kliring dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara dibuka untuk umum. Pertemuan kliring diadakan dua kali sehari dan jadwalnya ditetapkan untuk penyelenggara. Jika salah satu peserta kliring karena suatu hal tidak dapat ikut serta dalam kliring, peserta tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan yang telah disetujui kepada penyelenggara kliring sepuluh hari sebelumnya. Bila permohonan telah disetujui maka peserta yang bersangkutan diwajibkan mengemukakan hal tersebut dalam surat kabar yang mempunyai peredaran yang luas ditempat tersebut. Penyelenggara akan mengemukakan hal tersebut pada peserta dua hari kerja sebelum hari efektif.

Pertemuan kliring dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Kliring Penyerahan

Kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kliring penyerahan adalah:

a. Warkat di cap yang memuat sebutan kliring dan dicantumkan nomor kode peserta.

b. Persetujuan penyelenggara dan peserta lain.

c. Warkat dikelompokkan sesuai peserta. Warkat-warkat tersebut digolongkan menjadi:

1) Warkat kliring diserahkan untuk masing-masing peserta, yaitu:

- Nota debit keluar yaitu warkat yang disetorkan untuk nasabah satu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut.
- Nota kredit keluar yaitu warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah bank lain.

2) Warkat kliring yang diterima dari peserta lain, yaitu:

- Nota debit masuk yaitu warkat diserahkan untuk peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat.
- Nota kredit masuk yaitu warkat yang diserahkan untuk peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat.

d. Warkat debit dan warkat kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar.

e. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan.

- f. Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani untuk wakil peserta kliring.
- g. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.
- h. Penyusunan neraca kliring penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama peserta jelas.
- i. Wakil peserta kliring kembali ke bank masing-masing untuk menentukan layak tidaknya warkat yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan, kemungkinan-kemungkinan penyelesaian warkat-warkat tersebut antara lain:
 - 1) Warkat debit diselesaikan untuk masing-masing peserta apabila warkat tersebut memenuhi syarat dan dananya cukup tersedia. Warkat kredit dapat diselesaikan setelah diteliti terhadap kemungkinan kesalahan.
 - 2) Warkat debit yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan diatas akan dikembalikan pada peserta yang mengajukan saat kliring retur kembali.
 - 3) Penolakan disertai dengan surat keterangan penolakan yang berisi alasan-alasan penolakan warkat sesuai kebutuhan. Warkat asli diserahkan kepada peserta yang mengkliringkan dan tembusan kepada nasabah penyeter serta kepada penyelenggara.

- 4) Warkat yang diduga ada kaitan dengan kejahatan harus ditahan dan dikonfirmasi dengan polisi.

2. Kliring Retur

- a. Setelah warkat dikembalikan kemudian dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya. Daftar kliring ini beserta warkat-warkatnya diserahkan pada wakil peserta kliring. Setelah dilakukan serah terima warkat dalam kliring retur, lalu disusun neraca kliring retur.
- b. Penyelenggara selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta. Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring retur dibuat bilyet saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring. Apabila hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih besar daripada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut menang kliring. Demikian pula sebaliknya, apabila hasil penjumlahan kewajiban penerimaan tagihan lebih kecil daripada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut kalah kliring. Apabila masing-masing saldo kliring peserta sudah diselesaikan dan neraca gabungan telah seimbang maka kliring telah selesai. Jika bank tersebut menang kliring, berarti simpanan giro tersebut di Bank Indonesia menjadi bertambah, sebaliknya akan berkurang apabila bank tersebut kalah kliring.
- c. Jika sebuah bank tidak mempunyai cukup dana likuid di bank bersangkutan untuk menyelesaikan kalah kliring, maka akan berusaha mencari pinjaman dari bank lain atau *Call money*. Pinjaman ini

diberikan untuk jangka waktu yang pendek (paling lama tujuh hari) dan tingkat bunga yang tinggi meskipun bunga lebih tinggi daripada tingkat bunga pinjaman biasa, namun bank yang kalah kliring ini biasanya tetap menyetujui pinjaman tersebut karena kalah kliring harus diselesaikan dalam waktu yang relatif pendek.¹⁷

Untuk melihat apakah suatu bank mengalami kemenangan ataupun kekalahan, maka dapat digunakan rumus:

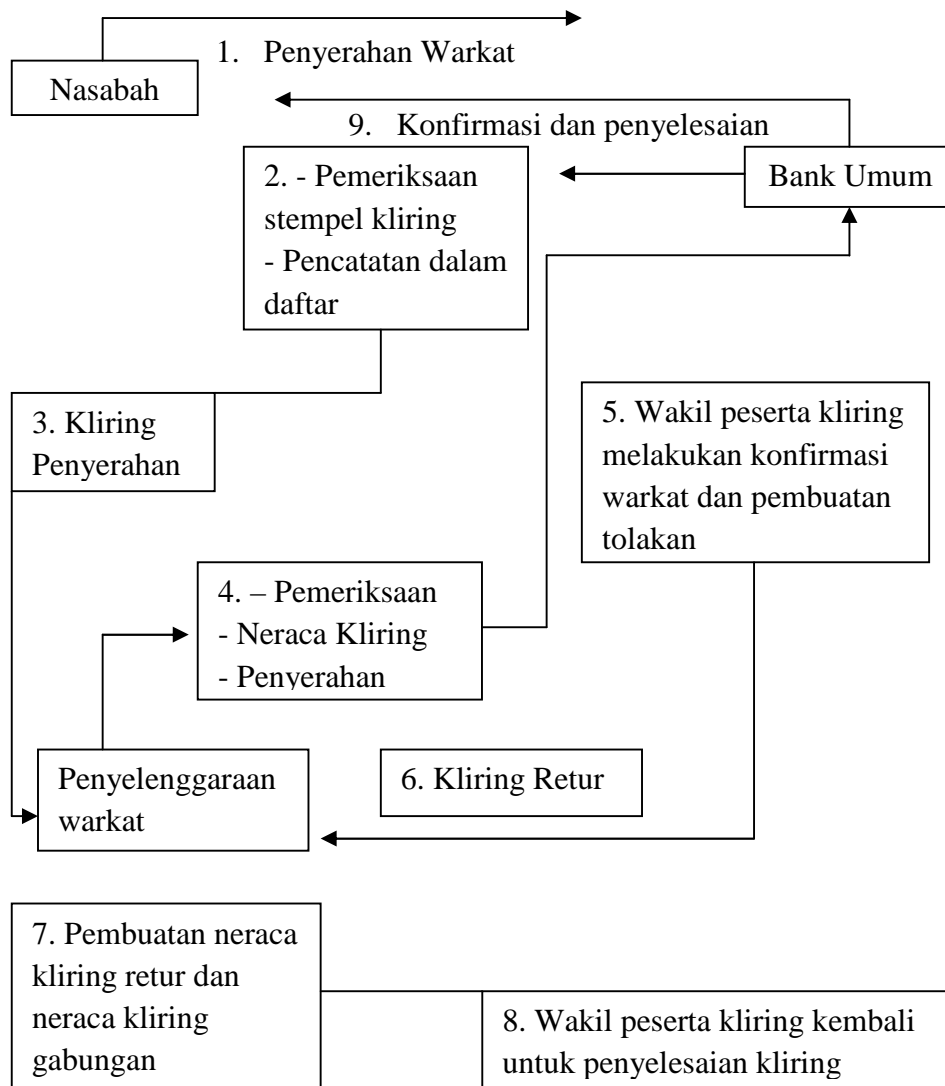
(warkat debit keluar + warkat kredit masuk) – (warkat debit masuk + warkat kredit keluar)

Jika hasilnya positif, berarti suatu bank menang kliring, begitu juga sebaliknya, apabila bank mengalami kekalahan maka bank tersebut mengalami kalah kliring.¹⁸

Mekanisme kliring dapat kita gambarkan dalam bagan sebagai berikut:

¹⁷Sri Susilo, dkk, *Op. Cit.*, h. 98

¹⁸Malayu Hasibuan, *Op. Cit.*, h. 120



Keterangan: Nasabah menyetorkan warkat ke Bank Umum, petugas kliring bank umum melakukan pemeriksaan warkat, stempel kliring dan pencatatan dalam daftar kliring, lalu warkat tersebut diserahkan kepada penyelenggara kliring, kemudian dilakukan pemeriksaan neraca kliring penyerahan kemudian wakil peserta kliring kembali ke Bank Umum untuk melakukan konfirmasi warkat dan pembuatan tolakan kliring kemudian wakil peserta kliring kembali ke penyelenggara kliring untuk melakukan kliring retur, disana dilakukan pembuatan neraca kliring retur dan neraca kliring gabungan/lengkap dengan retur rekapitulasi, kemudian wakil peserta kliring kembali ke Bank Umum untuk penyelesaian kliring, kemudian mengkonfirmasi dan penyelesaian kliring.¹⁹

F. Kliring Dalam Konsep Islam

a. Al-Quran

Salah satu dasar dibolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah

SWT toberkenan dengan kisah Ash-habul Kahfi,

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?’ Mereka menjawab, ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi), ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.’”(al-Kahfi:19).²⁰

¹⁹Sri Susilo, dkk, *Op. Cit.*, h. 100

²⁰Departemen Agama RI, h. 267

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang Ash-habul Kahfi yang bertindak untuk atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.²¹

Ayat lain menjadi rujukan al-wakalh adalah kisah Nabi Yusuf a.s saat ia berkata kepada raja,



Artinya: “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir).Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”(Yusuf:55)

Dalam konteks ayat ini,Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga “*Federal Reserve*” negeri Mesir.

b. Al Hadits

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah saw,mewakilkkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Ansyar untuk mewakilinya mengawini Maimunah bintil-Haris.”²²

c. Ijma

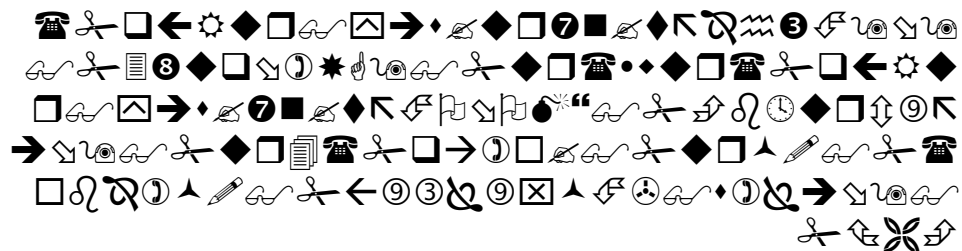
Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*.Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut jenis *ta’awun* atau tolong menolong atas dasar

²¹ Muhammad Syafi’I Antonio,*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,(Jakarta:Gema Insani,2001),h.120

²²*Ibid.*, h. 122

kebaikan dan taqwa.Tolong menolong diserukan oleh Al-quran dan disunnahkan oleh Rasulullah saw.²³

Allah berfirman:



Artinya:“...Dan,tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan takwa ,dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan ...”(Al-Maidah:2).²⁴

Rasululloh saw,bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

Artinya: “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

Kliring yang dilakukan merupakan wujud toleransi dan tolong menolong antar sesama manusia.Oleh karena itu Allah memandang bahwa wakalah adalah suatu bentuk kerja sama yang mulia karena melapangkan jalan orang lain agar keluar dari kesusahan. Allah sendiri akan membalas jasa kebaikan orang yang menolong saudaranya yang dalam masalah.

Adapun dalam transaksi kliring terdapat beberapa pihak,antara lain:

- Pemberi amanat (principal) yakni pihak yang memberikan amanat kepada bank.

²³ Ibid, h.122

²⁴ Departemen Agama RI,97

- Bank pengirim (remitting bank), yakni bank menerima perintah proses kliring.
- Bank tertarik (drawee bank) yakni bank yang harus melakukan pembayaran atas tagihan kliring yang diterimanya.
- Tertarik (drawee) yakni pihak yang harus membayar tagihan kliring.²⁵

Rukun dari akad wakalah yang apa harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:²⁶

- ✓ Pelaku akad, yaitu *muwakkil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain (penerima kuasa)
- ✓ Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan)
- ✓ *Sighah*, yaitu ijab dan Qabul.

Dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru di atas, dapat dilihat sesuai dengan rukun *wakalah*. Dimana Pelaku akad (*muwakkil*) sebagai nasabah dan penerima kuasa adalah bank Muamalat Pekanbaru, objeknya yaitu proses kliring baik berupa cek maupun BG, sedangkan *Sighah* merupakan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Dalam proses *sighah* ini nampak bahwa nasabah mewakilkan kepada Bank Muamalat Pekanbaru / *wakalah* untuk melakukan proses kliring.

²⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h.128

²⁶ Ascrya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) h.104

BAB IV
SISTEM OPERASIONAL KLIRING PADA BANK MUAMALAT
PEKANBARU DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Sistem Operasional Kliring Pada Bank Muamalat Pekanbaru

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang perbankan menjelaskan bahwa Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan di dalamnya disebutkan bahwa penyelenggara kliring antar bank dilakukan Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan kliring yang di selenggarakan oleh BI, dalam hal ini sebagai penyelenggaraan kliring, dewasa ini sudah diproses secara komputerisasi tidak lagi secara manual. Dengan begitu kegiatan kliring dapat di laksanakan dalam suatu system yang sebelumnya di terapkan, begitu pula dengan Bank Muamalat Pekanbaru, kegiatan kliring di lakukan secara otomatis dimana semua warkat setelah diperiksa kelengkapannya.

Pelaksanaan kliring ini dilakukan setiap hari kerja dilakukan dengan oleh bank Muamalat Pekanbaru kliring merupakan salah satu produk jasa mereka prosedur kegiatan kliring di Bank Muamalat Pertemuan kliring dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Kliring Penyerahan

Kegiatan yang perlu di lakukan terlebih dahulu sebelum kliring penyerahan adalah:

- a. Warkat di cap yang memuat sebutan kliring dan dicantumkan nomor kode peserta.
- b. Persetujuan penyelenggara dan peserta lain.
- c. Warkat dikelompokkan nasabah penyetor serta kepada penyelenggara.
- d. Warkat yang diduga ada kaitan dengan kejahatan harus ditahan dan dikonfirmasi dengan polisi.

1. Kliring Retur

Setelah warkat dikembalikan kemudian dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya. Daftar kliring ini beserta warkat-warkatnya diserahkan pada wakil peserta kliring. Setelah dilakukan serah terima warkat dalam kliring retur, lalu disusun neraca kliring retur.

Penyelenggara selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta. Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring retur dibuat bilyet saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring. Apabila hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih besar daripada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut menang kliring. Demikian pula sebaliknya, apabila hasil penjumlahan kewajiban penerimaan tagihan lebih kecil daripada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut kalah kliring. Apabila masing-masing saldo kliring peserta sudah diselesaikan dan neraca gabungan telah seimbang maka kliring telah selesai. Jika bank tersebut menang kliring, berarti simpanan giro tersebut di

Bank Indonesia menjadi bertambah, sebaliknya akan berkurang apabila bank tersebut kalah kliring. a warkat setelah diperiksa kelengkapannya

Jika sebuah bank tidak mempunyai cukup dana likuid di bank bersangkutan untuk menyelesaikan kalah kliring, maka akan berusaha mencari pinjaman dari bank lain atau *Call money*. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu yang pendek (paling lama tujuh hari) dan tingkat bunga yang tinggi meskipun bunga lebih tinggi daripada tingkat bunga pinjaman biasa, namun bank yang kalah kliring ini biasanya tetap menyetujui pinjaman tersebut karena kalah kliring harus diselesaikan dalam waktu yang relatif pendek. Lakukan setiap hari kerja oleh Bank Muamalat Pekanbaru kliring salah satu produk jasa mereka. prosedur kegiatan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru dilakukan dengan kliring penyerahan dan kliring pengembalian.

Sistem yang digunakan pada Bank Muamalat pekanbaru dalam proses kliring ini adalah *SKNBI*, system yang menggunakan program otomatis yang telah difasilitasi oleh BI dalam pengiriman dan penyimpanan data untuk proses kliring.

Pegawai kliring di bank Muamalat Pekanbaru berjumlah 6 orang, tetapi yang bekerja ada 3 orang, yang lainnya melakukan pekerjaan yang lain. Sedangkan penetapan karyawan kliring yang ditetapkan oleh BI berjumlah 7 orang.¹ Sedangkan pelaksanaan pekerja kliring di Bank Muamalat pekanbaru berjumlah 3 orang. Hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan kliring tidak berjalan secara optimal.

Adapun Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kliring antara lain:

¹ Toni, karyawan PT Bank Muamalat Pekanbaru, wawancara, Hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012, 11.30

1. Lamanya waktu yang di butuhkan dalam penyelenggaraan transaksi kliring.di mulai saat nasabah datang membawa warkat lalu di periksa kelengkapanya oleh petugas kliring.jika sudah lengkap di masukkan datanya secara otomatisasi,lalu fisik warkat dikirim ke sentral kliring,.jika warkat di tolak atau ada masalah seperti saldo tidak cukup,dan lain – lain membutuh kan waktu yang lebih lama,hal ini pasti berdampak pada kepuasan nasabah atas pelayanan penolakan atas cek atau bilyet giro Bank Muamalat PekanbaruI yang dikliringkan.

2 . Penolakan atas cek atau bilyet giro yang di kliringkan

a. Tidak terpenuhi.syarat – syarat penulisan pada warkat,seperti:

1) Ada perubahan atau penambahan pada warkat tetapi tidak di tandatangani setiap coretan perubahan atau penambahan harus di tandatangani oleh penarik untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan akibat perubahan sesuatu di warkat kliring.

2) Tanda tangan tidak sama dengan specimen.

Bank dapat menolak membayarkan warkat apabila tanda tangan penarik tidak persis sama dengan contoh tanda tangan yang ada di bank (spesimen).

3) Cap perusahaan tidak ada.

4) Penulisan nominal pada angka tidak sama.

Misalnya pada jumlah angka adalah Rp.3.500.000, _tetapi jumlah huruf di cantumkan “tiga juta lima ribu rupiah”.

b. Warkat belum termasuk tanggal efektif

Dalam hal ini warkat belum jatuh tempo dan hanya dapat di batalkan oleh penarik tetapi dengan catatan saldo mencukupi.

- c. Saldo pada rekening nasabah tidak mencukupi.

Dalam hal ini saldo nasabah tidak imencuku untuk membyar warkat – warkat yang ia tarik atau nasaabah yang memiliki fasilitas kredit di mana penariknya melebihi plafon kreditnya.

- a. Cek / BG sudah kadaluarsa

Bila Cek / bilyet giro telah melebihi 70 hari dari tanggal ppembukaan atau tanggal jatuh temponya (untuk biyet giro),maka cek / bilyet giro tidak dapat di bayar lagi oleh bank karena kadaluarsaa.

- e. Bea materai belum lunas

Pemerintah telah menetapkan pajak materai untuk setiap penarikan,baik cek/bilyet giro.dalam hal ini bank berhak menolak melakukan pembayaran bila bea materai belum terpenuhi.

- f. Stempel kliring tidak ada

- g. Stempel Kliring tidak sesuai bank penerima.

Misalnya warkat kliring untuk warkat X ternyata stejpel kliring bank Y

- h. Warkat atau rekening di blkir pembayaranya.

Untuk warkat atau rekening yang di blokir pembayaranya oleh instansi yang berwenang,bank tidak boleh melaksanakan pembayaran atas warkat tersebut.

- 3. Penolakan atas credit note yang dikliringkan.

Penolakan ini mungkin di sebabkan karena:

- a. Rekening nasabah yang akan di kreditkan sudah di tutup termasuk di tutup atas permintaan nasabah,.untuk rekening yang di tutup,maka cek / billyet giro akan di beri cap “rekening telah di tutup” oleh bank.
 - b. Nomor rekening salah dan account nama berbeda
4. Gangguan system computer,kendala transmit pengiriman data
 5. Warkat yang di kirim Ke BI kurang.

Misalnya: laporan ke BI 10 buah warkat ternyata fisik nya 9 buah karena warkat hilang atau terselip.

1. Dalam pelaksanaan kliring, terkadang nasabah melakukan tindakan yang melanggar aturan akad seperti melakukan penarikan cek kosong. Praktek penarikan cek kosong ini baru dapat diketahui setelah kliring kedua (retour). Terhadap hal ini bank melakukan beberapa tindakan sebelum terjadinya kliring kedua, antara lain memberi fasilitas *overdraft* pada nasabah atau memberi sanksi berupa penutupan rekening giro.

Overdraft merupakan suatu jasa yang diberikan oleh Bank Muamalat Pekanbaru karena nasabah kekurangan dana. *Overdraft* ini merupakan jasa dalam bentuk kredit yang pengembaliannya harus disertai tambahan.*Overdraft* ini merugikan nasabah.

Alasan – alasan penolakan tersebut telah di rumus kan oleh bank Indonesia sebagai pedoman oleh Bank Muamalat untuk mennyimpulkan penolakan warkat kliring.

Berbagai masalah yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan kliring tentunya tidak terlepas dari faktor human error,baik dari nasabah maupun

pihak karyawan Bank Muamalat Pekanbaru, dan factor technical error seperti gangguan system computer, dan sebagainya.

Solusi yang dapat mengatasi atau mengurangi masalah tersebut adalah:

Dalam personalia sebaiknya manajemen perlu menggunakan karyawan sesuai dengan ketentuan dari BI sebanyak 7 Orang. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kliring itu memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam melakukan kegiatannya. Ini berguna supaya pelaksanaan kliring dapat dilakukan lebih cepat lagi.

Jika terdapat gangguan pada system computer karena kendala transmit pengiriman data maka solusinya adalah menggunakan cara kliring manual, dimana proses memasukan data kliring di simpan dalam disk atau flash disk dan nantinya akan di serahkan ke sentral kliring Bank Muamalat.

Jika warkat yang dikirim ke BI kurang karena hilang atau terselip maka petugas mengecek kembali warkatnya, jika tidak ketemu Bank Muamalat minta copy warkat ke bank Indonesia yang berisi nomor seri warkat, dan lain - lain.

Masalah cek kosong, solusinya petugas kliring akan menghubungi nasabah nya lewat telpon jika dana yang akan di klirinkan tidak mencukupi. Pada kesempatan ini pihak Bank Muamalat Pekanbaru akan mengingatkan nasabahnya untuk lebih teliti lagi dalam mengisi cek atau bilyet giro tersebut. Bila penolakan di karnakan saldo tidak cukup atau dana

tidak ada sebaiknya nasabah berhati – hati karena bila telah 3 kali dilakukan dengan nomor warkat yang berbeda maka nasabah tersebut akan masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia ,ini tentunya akan berdampak buruk bagi Bank Muamalat Pekanbaru.oleh karena itu nasabah harus benar – benar di perhatikan,di berikan penjelasan sedetail mungkin tentang mengeluarkan cek atau bilyet giro.sedangkan untuk nasabah yang ingin mengirimkan uangnya ke nasabah bank lain,pihak Bank Muamalat harus memastikan kebenaran pengisian slip permohonan pengiriman uang dan tanyakan lagi pada nasabahnya apakah data yang diisikan tersebut telah benar dan lengkap.ini untuk penolakan atas note Bank Muamalat Pekanbaru.

B) Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Kliring Pada Bank Muamalat

Dalam Islam, kliring identik dengan istilah *wakalah*. *Wakalah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah mendatangkan banyak manfaat, maka Islam menetapkan sebagai bentuk muamalah yang baik dan dibenarkan syara'.*Wakalah* tersebut dianjurkan untuk dilaksanakan sepanjang tidak adanya eksploitasi dari salah satu pihak yang akan menimbulkan rusaknya akad dan bisa menuju riba yaitu penambahan jumlah saat pengembalian.

Kliring yang dilakukan pada Bank Muamalat Pekanbaru merupakan wujud toleransi dan tolong menolong antar sesama manusia.

Oleh karena itu Allah memandang bahwa wakalah adalah suatu bentuk kerja sama yang mulia karena melapangkan jalan orang lain agar keluar dari kesusahan. Allah sendiri akan membalas jasa kebaikan orang yang menolong saudaranya yang dalam kesusahan. Tolong menolong diserukan oleh Al-quran dan disunnahkan oleh Rasulullah saw.²

Allah berfirman

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

Artinya: "...Dan,tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan takwa ,dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan ...(al-maidah:2).³

Rasululloh saw,bersabda,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

*"Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."*HRMuslim⁴

Lembaga kliring merupakan,suatu lembaga dari bank sentral (Bank Indonesia yang mempunyai fungsi melaksanakan perhitungan hutang pitang antara bank peserta kliring.Perhitungan hutang piutang antara peserta kliring dilakukan secara terpusat disuatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat berharga yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.Bank Indonesia sebagai pelaksana dan pemimpin kliring mengorganisir seseorang untuk menerbitkan cek yang akan diserahkan kepada pihak lain,dimana pihak

² Ibid, h.122

³ Departemen Agama RI,97

⁴ Muhammad syafi' Antonio,Op.cit. h.122

penerbit maupun penerima mempunyai rekening giro pada suatu bank yang berlainan dan menghendaki dilaksanakan dengan cara pemindahan bukuan melalui kliring. Dengan cara ini, maka penyelesaian hutang piutang dapat dikatakan aman, cepat dan mudah.

Islam memberikan ketentuan hutang piutang yang dimaksudkan untuk tidak merugikan satu sama lain baik pihak yang memberikan piutang (kreditur), maupun pihak yang berhutang (debitur) juga memberikan pada debitur yang melunasi hutangnya apabila sudah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al maidah ayat 1:



Artinya: Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu....

Dari dalil diatas dapat diketahui bahwa dapat diketahui bahwa dianjurkan bagi seorang muslim untuk menolong sesamanya dengan cara memberi hutang bagi yang membutuhkan.

Adapun dalam transaksi kliring terdapat beberapa pihak, antara lain:

- Pemberi amanat (principal) yakni pihak yang memberikan amanat kepada bank.
- Bank pengirim (remitting bank), yakni bank menerima perintah proses kliring.
- Bank tertarik (drawee bank) yakni bank yang harus melakukan pembayaran atas tagihan kliring yang diterimanya.

- Tertarik (*drawee*) yakni pihak yang harus membayar tagihan kliring.⁵

Rukun dari akad *wakalah* yang apa harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- ✓ Pelaku akad, yaitu *muwakkil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain (penerima kuasa)
- ✓ Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan)
- ✓ *Sighah*, yaitu ijab dan Qabul.

Dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru di atas, dapat dilihat sesuai dengan rukun *wakalah*. Dimana Pelaku akad (*muwakkil*) sebagai nasabah dan penerima kuasa adalah bank Muamalat Pekanbaru, objeknya yaitu proses kliring baik berupa cek maupun BG, sedangkan *Sighah* merupakan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Dalam proses *sighah* ini nampak bahwa nasabah mewakilkan kepada Bank Muamalat Pekanbaru / *wakalah* untuk melakukan proses kliring.

Rasululloh SAW juga pernah melakukan *wakalah*/perwakilan. Ini dapat dilihat dari hadist:⁶

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah saw, mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Ansyar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti-Haris.”

⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h. 128

⁶ M. Syafi’i Antonio, *Loc. Cit.*,

Dalam ekonomi islam, ada yang menjelaskan bahwa melaksanakan sesuatu yang ditugaskan kepada seseorang merupakan suatu amanah. Implikasi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi atau golongan. Tanpa amanah manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Maka prinsip ekonomi islam harus diterapkan dalam kehidupan sehingga tercapai tujuan akhir dari ekonomi islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Praktek penarikan cek kosong ini baru dapat diketahui setelah kliring kedua (*retour*). Terhadap hal ini bank melakukan beberapa tindakan sebelum terjadinya kliring kedua, antara lain memberi fasilitas *overdraft* pada nasabah.

Overdraft merupakan suatu jasa yang diberikan oleh Bank Muamalat Pekanbaru karena nasabah kekurangan dana. *Overdraft* ini merupakan jasa dalam bentuk kredit yang pengembaliannya harus disertai tambahan (denda).

Denda adalah penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan atau penunggakan pembayaran atau penambahan '*ain* (barang kontan) atas *dhain* (harga Hutang) terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditukar atau ditimbang.⁷

⁷ Gufran.A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 159

Dalam Pandangan islam denda sama dengan riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua masing-masing adalah riba *qard* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi riba *fadhhl* dan riba *nasiah*. Riba *qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu disaratkan terhadap yang berhutang. Riba *jahiliyah* adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba *fadhhl* adalah pertukaran suatu barang dengan barang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan ensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.⁸ Riba *nasiah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasiah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian.⁹

Karena denda pada *Overdraft* adalah bagian dari riba, maka kedudukannya hukumnya sama halnya dengan riba. Bila ditinjau dari segi pengertiannya denda tersebut juga dapat digolongkan kedalam riba *nasiah*.

Adapun pandangan mujtahid Islam terhadap denda jatuh tempo adalah seperti yang terlihat dalam pendapat berikut:

Didalam buku Fatwa-Fatwa Kontemporer yang dikutip Ikamala Sari, seseorang menanyakan “apakah boleh menetapkan denda atas

⁸Veithzal Rival, SE., M.M., MBA. Dan Ir. H. Ariviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 321

⁹ Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 41

keterlambatan pembayaran, khususnya bagi orang-orang yang mengulur-ulur pembayaran kredit cukup beralasan benar. Hal ini karena denda tersebut sama dengan bunga yang diambil dari orang yang terlambat membayar utang. Adapun perbedaannya adalah bahwa bunga terikat dengan jumlah uang yang diambil dan waktu keterlambatannya. Sedangkan dalam pernyataan diatas, jumlah denda ditetapkan tanpa terikat dengan kredit dan waktu keterlambatan.¹⁰

PT Bank Muamalat Pekanbaru dalam mengatasi keteledoran ini karena terlambatnya nasabah kliring memberitahu atas kekurangan dana di rekening giro (penipuan), dan nasabah terlambat membayar kredit tersebut. Selain itu denda ini memberi efek jera bagi yang melakukan penipuan ini. Supaya tidak dilakukan lagi dikemudian hari.

Sebagian ulama (ijtihad) abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai uang dan mampu membayar, namun ia mengulur-ulurkan pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dengan catatan menganggap benda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya atau digunakan kegiatan sosial. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khattabah dari mazhab Maliki.¹¹

Dari uraian diatas bahwa pelaksanaan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Islam karena pihak bank menganut prinsip tolong menolong dan prinsip kehati-hatian

¹⁰Putri Ikamala Sari, *Sanksi Jatuh Tempo Kredit di PT. Menara Dana Sejahtera Pekanbaru di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Muamalah, 2004. H. 57

¹¹ Ibid

sertamelakukan efek jera bagi yang melakukan bentuk penipuan ini.Namun
disisi lain, berhubungan dengan denda yang dilakukan oleh Bank Muamalat
Pekanbaru dapat digolongkan ke dalam riba *nasiah*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan kliring ini dilakukan setiap hari kerja oleh Bank Muamalat Pekanbaru kliring salah satu produk jasa mereka. prosedur kegiatan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru adalah sebagai berikut
Pelaksanaan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru dilakukan yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian.
2. Pelaksanaan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru dibolehkan dalam islam karena pihak bank menganut prinsip tolong menolong dan prinsip kehati-hatian.

B. Saran

Solusi yang dapat mengatasi atau mengurangi masalah yang dalam pelaksanaan kliring di Bank Muamalat Pekanbaru adalah:

1. Dalam personalia sebaiknya manajemen perlu menggunakan karyawan sesuai dengan ketentuan dari BI sebanyak 7 Orang. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kliring itu memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam melakukan kegiatannya.
2. Jika terdapat gangguan pada system computer karena kendala transmit pengiriman data maka solusinya adalah menggunakan cara kliring manual, dimana proses memasukan data kliring di simpan dalam disk atau

flash disk dan nantinya akan di serahkan ke sentral kliring Bank Muamalat.

3. Jika warkat yang dikirim ke BI kurang karena hilang atau terselip maka petugas menecek kembali warkatnya, jika tidak ketemu Bank Muamalat minta copy warkat ke bank Indonesia yang berisi nomor seri warkat, dan lain - lain.
4. Dalam mengatasi cek kosong adalah petugas kliring akan menghubungi nasabah nya lewat telpon jika dana yang akan di klirinkan tidak mencukupi. pada kesempatan ini pihak Bank Muamalat Pekanbaru akan mengingatkan nasabahnya untuk lebih teliti lagi dalam mengisi cek atau bilyet giro tersebut.
5. Berbagai masalah yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan kliring tentunya tidak terlepas dari faktor human error, baik dari nasabah maupun pihak karyawan Bank Muamalat Pekanbaru, dan factor technical error seperti gangguan system computer, dan sebagainya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.Mas'adi, Gufran.*Fiqih Muamalah Konstektual*, Jakarta:PT.Raja Gravindo Persada,2002
- AchmadAnwari,*Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan*, Jakarta: Balai Aksara, 1985
- Ascrya ,*Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) h.104
- Bank Muamalat, *Panduan Produk dan Layanan Divisi Pengembangan Produk dan Service Quality*, Jakarta: 2004
- Departemen Agama RI
- Dokumentasi Bank Muamalat*, tahun 1994
- Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat.2010
- Hasan,Zubairi,*Undang- Undang Perbankan Syariah, Jakarta, : Rajawali Pers.,2011*
- Hasibuan, Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Lapoliwa, N dan Danil Kuswandi, *Akuntansi Perbankan*, Jakarta: Institut Banker Indonesia, 1988
- Pratama, Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997
- Purwadarnita, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Putri Ikamala Sari, *Sanksi Jatuh Tempo Kredit di PT. Menara Dana Sejahtera Pekanbaru di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Muamalah*,2004.
- Rival,Veithzal. Ariviyan Arifin,*Islamic Banking*,Jakarta : Bumi Aksara,2011
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1999
- Soehadi,*Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*,Yogyakarta : Lukman offset, 1999

Soemitra, Andri, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group

[Staffsite.Gunadarma.ac.id/Mudasah/index.php?stateid=download&id=6400&part=files:Akuntansi Kliring](http://Staffsite.Gunadarma.ac.id/Mudasah/index.php?stateid=download&id=6400&part=files:Akuntansi%20Kliring)

[Staffsite.Gunadarma.ac.id/Mudasah/index.php?stateid=download&id=6400&part=files:Akuntansi Kliring](http://Staffsite.Gunadarma.ac.id/Mudasah/index.php?stateid=download&id=6400&part=files:Akuntansi%20Kliring), 12.03pm, 06 Agustus 2008

Suhendi, Wawancara, Account Manager Pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Sumitro, Warkum, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Susilo, Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 1990

Suyatno, Tomas, Dkk, *Kelembagaan Perbankan Edisi II*, Jakarta: Pustaka Utama, 1996

Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001),

Toni, karyawan PT Bank Muamalat Pekanbaru, wawancara,

Undang Grafika -Undang RI No. 10 tahun 1998, *Tentang Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007